



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DICKY SAROMI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 109993

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 316 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , WARISAN Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 3055 m2/36 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 388 m2/238 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
4. Bangunan Seluas 41 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 380.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, HONDA HR-V JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOBIL, SUZUKI FE GL AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 63.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 5.071.364.234**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 9.314.364.234**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 9.314.364.234**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.